

DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI



LAPORAN TAHUNAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap unit pemerintah yang menguasai informasi publik diwajibkan untuk memberikan layanan informasi publik. Tujuan diterbitkannya UU No.14/2008 adalah :

- 1) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan pasal 1 UU No.14/2008 yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai UU No.14/2008, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Yang dimaksud Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan pengertian di atas maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi Badan Publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga perlu di tunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan, kriteria PPID adalah pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik dan/atau kehumasan sehingga untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menjadi PPID adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

**BAB II**  
**DEMOGRAFI PEMOHON, CAPAIAN DAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL**  
**PERBENDAHARAAN SERTA *PENDING MATTERS***

**A. Demografi Pemohon Informasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan mempunyai kantor vertikal sebanyak 33 Kantor Wilayah dan 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 8 fungsi utama sebagai berikut :

1. Fungsi Pelaksanaan Anggaran.
2. Fungsi Pengelolaan Kas.
3. Fungsi Sistem Manajemen Investasi.
4. Fungsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah.
6. Fungsi Dukungan Teknis Perbendaharaan.
7. Fungsi Penyempurnaan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan.
8. Fungsi Pemberdayaan dan Integrasi Sumber Daya Organisasi.

Permintaan informasi publik kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama tahun 2015, didominasi oleh permintaan informasi terkait dengan fungsi pelaksanaan anggaran yaitu realisasi anggaran suatu pekerjaan/proyek pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Selain itu terdapat permintaan informasi mengenai data rincian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan permintaan kumpulan publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa majalah, buletin, media, buku jurnal atau hasil penelitian, buku-buku panduan, dan leaflet artikel dsb.

Pemohon informasi publik pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah terkait penelitian/kajian dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta wartawan terkait transparansi penggunaan dana proyek/kegiatan. Sebaran informasi/data terutama pada realisasi pelaksanaan proyek/kegiatan berada pada kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan terutama pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

**B. Capaian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Periode Januari s.d Desember 2015**

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menetapkan Daftar Informasi Periode Januari s.d Desember 2015. Daftar Informasi Publik tersebut telah dilakukan uji konsekuensi dengan klasifikasi sesuai

dengan PMK 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan. Klasifikasi Informasi Publik yang disusun ke dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Pertama, Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan, Pada Kelompok ini terdiri dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
- b. Kedua, Informasi Publik yang dikecualikan.

Adapun klasifikasi Informasi Publik tersebut secara detil dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1  
Daftar Informasi Publik Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Periode Januari s.d Desember 2015

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN	
Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	
No	Nama Informasi
1	Informasi tentang profil Kementerian Keuangan, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak</li> <li>b. Struktur organisasi</li> <li>c. Gambaran umum satker</li> <li>d. Profil singkat pejabat struktural</li> <li>e. Tugas dan fungsi</li> <li>f. Visi dan misi</li> <li>g. Laporan harta kekayaan</li> </ol>
2	Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Matrik program, kegiatan dan target Perbendaharaan 2015</li> <li>b. Agenda Penting terkait Pelaksanaan tugas badan publik</li> <li>c. Informasi Khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat</li> <li>d. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum</li> <li>e. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat kementerian keuangan</li> </ol>
3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
4	Ringkasan laporan keuangan
5	Ringkasan laporan akses informasi publik
6	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik
7	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi
8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan
9	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa
10	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik
Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta	

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN	
<b>Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat</b>	
1	Daftar informasi publik Ditjen Perbendaharaan
2	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Ditjen Perbendaharaan
3	Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
4	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan</li> <li>b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai Ditjen Perbendaharaan</li> <li>c. DIPA RKA/KL Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015</li> <li>d. Laporan keuangan Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015</li> <li>e. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Kementerian Keuangan</li> </ul>
5	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga
6	Surat menyurat pimpinan atau pejabat kementerian keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
7	Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan
8	Data perbendaharaan atau inventaris
9	Rencana strategis dan rencana kerja Ditjen Perbendaharaan
10	Agenda kerja pimpinan
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN	
1	Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Selama periode Januari s.d Desember 2015 jumlah pemohon informasi kepada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan berjumlah 12 pemohon dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

Permohonan Informasi Publik yang langsung diterima oleh PPID Ditjen Perbendaharaan Periode Tahun 2015

No.	Pemohon	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID
1	Sdr. Bustan yang merupakan mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran  25 Februari 2015	Data realisasi pemerintah pusat per fungsi Transportasi, Pertanian, Perlindungan Sosial, Pendidikan dan Belanja Bantuan Sosial dari tahun 2010 s.d 2013 pada 33 Provinsi di Indonesia	Data awal penelitian Sdr. Bustan yang merupakan mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran	Data diberikan
2	Sdr. Adi Purwanto yang merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  03 Maret 2015	Pengaruh UKA, Dana BOS terhadap UN	Penulisan skripsi	Diteruskan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No.	Pemohon	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID
3	Ridwan Ilham Wicaksono yang merupakan mahasiswa STIS Jakarta 27 April 2015	Target dan Realisasi PNPB triwulanan periode 1998-2014 dan Nota Keuangan	Memenuhi nilai akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta	Diteruskan ke Direktorat Jenderal Anggaran
4	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 27 Mei 2015	Permintaan historis data bulanan realisasi APBN Indonesia periode Januari 2010 sampai dengan April 2015	Untuk menyelaraskan rencana bisnis perusahaan dengan ekspektasi perkembangan makro ekonomi Indonesia ke depan	Data diberikan
5	PT. SCG Indonesia 01 Juni 2015	Data realisasi APBN 2015 Triwulan I	Menunjang bisnis di bidang manufaktur dan untuk mengetahui lebih mendalam rencana pemerintah kedepannya	Data diberikan

Tabel 3  
Permohonan Informasi yang merupakan penerusan dari PPID Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Periode Tahun 2015

No.	Pemohon	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID
1	Sdr. Teguh Widodo (Phd Researcher University of Birmingham) 19 Maret 2015	Dokumen Ministry of Finance (2001), <i>Reform of the public Finance Management System in Indonesia : Principles and Strategy, White Paper, Financial Management Reform Committee</i>	Keperluan penelitian	Data diberikan tanggal 26 Maret 2015 (5 HK)
2	Sdri. Tilas Notapiri seorang mahasiswa yang beralamat di Jalan Kapt P Tendean No.06 Kabupaten Kapuas Prov.Kalimantan Tengah 27 Maret 2015	Data belanja pemerintah pusat menurut fungsi lingkungan dan jenis belanja periode 2010-2014	Menyusun Neraca Pengeluaran Perlindungan Lingkungan Periode 2010-2014	Data diberikan tanggal 08 April 2015 (7 HK)
3	Sdr. Yusef Gunawan Bendahara Pengeluaran pada Satker Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Barito Timur TA. 2012 11 Mei 2015	Permintaan penjelasan mengenai tugas Bendahara Pengeluaran dalam hal mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN	Dalam rangka menjawab/menjelaskan tugas Bendahara Pengeluaran kepada jaksa penyidik	Data diberikan tanggal 20 Mei 2015 (6 HK)
4	Sdr. Akied Mubarak 27 Mei 2015	Realisasi anggaran Fakultas Ekonomi Untirta tahun 2007 s.d. 2014	Informasi pribadi sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Untirta dan dalam rangka reformasi birokrasi Fakultas Ekonomi Untirta	Data diberikan tanggal 08 Juni 2015 (7 HK)
5	Sdr. Mohammad Dawam 20 Agustus 2015	Ringkasan data/realisasi APBN Tahun Anggaran 2010	Bahan penunjang penelitian tesis di Universitas Mpu Tantular, Jakarta	Data diberikan tanggal 28 Agustus 2015 (6 HK)

No.	Pemohon	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Keputusan PPID
6	Sdri. Susiyami Rahayuningsih  23 Oktober 2015	Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Tunjangan Bahaya Radiasi sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2014 dan SK Permenkes No.56 Tahun 2015 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi	Informasi pribadi sebagai seorang PNS	Data diberikan tanggal 03 November 2015 (7 HK)
7	Sdr. Lukmanul Latif HRP  21 Desember 2015	Perlakuan terhadap pencairan biaya riil pengeluaran untuk pengawasan dalam satu kegiatan yang melebihi harga satuan biaya pengawasan per kegiatan, serta dasar untuk melakukan pencairan anggaran	Sebagai dasar pencairan anggaran	Data diberikan tanggal 31 Desember 2015 (7 HK)

Jumlah pemohon informasi pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama tahun 2015 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang Diajukan Melalui Surat/email/langsung Periode Tahun 2015

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yg Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Pebruari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	3	8,33 HK	2	0	1	0	0	1
April	1	7,00 HK	1	0	0	0	0	0
Mei	2	8,00 HK	1	0	1	0	0	1
Juni	3	9,00 HK	3	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	1	6,00 HK	1	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	1	7,00 HK	1	0	0	0	0	0
Desember	1	7,00 HK	1	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>7,92 HK</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 5

Rekapitulasi Permohonan Informasi Melalui Telepon Periode Tahun 2015

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Permohonan yang Dipenuhi
Januari	-	-
Pebruari	-	-
Maret	-	-

April	-	-
Mei	-	-
Juni	-	-
Juli	-	-
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	-	-
November	-	-
Desember	-	-

Tabel 6

Rekapitulasi Sengketa Informasi Periode Tahun 2015

Bulan	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi Nasional	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. Kegiatan Internal PPID/Unit Layanan Informasi**

Kegiatan Internal PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan menangani permintaan data biasa dari pemohon. Pengajuan permohonan masuk melalui Tata Usaha Sekretariat Ditjen Perbendaharaan ataupun melalui Direktorat Teknis Lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

**D. Pending Matters**

Pending Matters yang masih harus dilakukan adalah terkait penyusunan SOP (*Standar Operating Procedure*), Untuk SOP (*Standard Operating Procedure*) pelayanan informasi publik pada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan masih dalam tahap penyusunan.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang harus dilaksanakan oleh setiap Badan Publik, termasuk seluruh unit pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan, selama tahun 2015 telah melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut dengan melakukan pemberian layanan informasi publik berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selama tahun 2015 PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerima 12 pemohon informasi dimana 2 permohonan ditolak untuk diteruskan kepada unit eselon I lain di Kementerian Keuangan sedangkan sisanya berhasil dipenuhi tepat waktu. Selain itu juga PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah berhasil menyusun klasifikasi informasi Publik (yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan).

Pada tahun 2015 juga terdapat perubahan wewenang dalam pengelolaan PPID Ditjen Perbendaharaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan terdapat perubahan pengelolaan PPID yang pada awalnya berada di bawah wewenang Subbagian Penilaian Kinerja dan Pelaporan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen Perbendaharaan kemudian menjadi di bawah wewenang Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan.